



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

RANCANGAN AKHIR RENJA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024



Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Raden Puguh Puyung Praya



<https://lomboktengahkab.go.id>



+6281907601122



perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini diantaranya mengacu pada undang – undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang isinya merupakan penjabaran rinci tentang Program Kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran serta sumbernya guna mencapai masing – masing target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

Dengan telah dikeluarkannya dokumen Renja ini, maka diminta kepada semua pihak terutama masing-masing unit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dijadikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2024 sehingga kinerjanya dapat lebih terarah dan terukur.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan tetap membuka diri atas saran maupun masukan untuk penyempurnaannya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat memberi manfaat lebih bagi yang membutuhkannya.

Praya, Juli 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah,



Ir. LALU RAHADIAN, M.Si.
NIP. 196712311992031117



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	21
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	23
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PUPR	36
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	43
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	44
BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	46
BAB V PENUTUP	61



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas PUPR ..	5
Tabel 2.2. Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target yang direncanakan	16
Tabel 2.3. Program/Kegiatan yang Memenuhi Target yang direncanakan	16
Tabel 2.4. Program/Kegiatan yang Melampaui Target yang direncanakan	20
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah - Tahun 2021	25
Tabel 2.6. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	26
Tabel 2.7. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	34
Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	39
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB	41
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	43
Tabel 4.1. Rencana Kerja Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja (RENJA) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan prasarana harus diselenggarakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas daerah dan nasional, serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. Dalam proses pembangunan dewasa ini, ketersediaan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan. Selain dengan melaksanakan pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan wilayah, upaya pemeliharaan prasarana secara terus menerus juga diperlukan. Upaya pemeliharaan ini berakibat diperlukannya sejumlah dana yang terus bertambah, karena tidak hanya prasarana yang memerlukan pemeliharaan makin membesar, tetapi juga biaya untuk material dan tenaga kerja juga meningkat. Upaya untuk melaksanakan pemeliharaan yang efisien perlu terus dilakukan sehingga keterbatasan biaya yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan berkurangnya kemampuan daerah tidak akan memperburuk kondisi prasarana. Salah satu cara efisien dalam pembangunan prasarana adalah melalui pemeliharaan yang baik. Umur pelayanan prasarana tidak hanya bergantung pada kualitas konstruksi prasarana yang telah dibangun, tetapi bergantung juga pada cara pemeliharaan. Oleh karena itu perlu disusun Rencana Kerja (Renja) untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan prasarana dengan pendanaan yang



terbatas dan memperhatikan skala prioritas karena prasarana dengan kondisi mantap akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, terukur dan aman untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dan mampu berperan sebagai katalisator serta memberikan kontribusi yang nyata untuk terciptanya stabilitas sosial politik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai pedoman rencana kerja yang memuat tentang arah kebijakan, program dan kegiatan, dan hal yang ingin dicapai pada tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasn hukum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
8. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021- 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada setiap unit kerja lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu satu tahun ke depan yakni untuk Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang strategis dan menjadi prioritas penanganan dalam waktu satu tahun anggaran guna mencapai sasaran RKPD Kabupaten Lombok Tengah dan sebagai wujud implementasi nyata atau penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Disamping itu nantinya didalam menyusun program dan kegiatan maupun hingga pada tahapan penyusunan sub-kegiatan dapat lebih terarah dan terukur yang pada akhirnya dapat mencapai sasaran pokok sesuai dengan tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Secara sistematis penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra (Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, serta Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka perwujudan pencapaian target pada program kegiatan.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU (TAHUN ANGGARAN 2023)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi

target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja tahun 2022 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026.

Pada Renstra (Rencana Strategis) Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, dimana untuk tahun 2021 merupakan tahun kondisi awal didalam mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya dalam bidang penyediaan layanan infrastruktur publik.

Berikut merupakan sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas PUPR yang tertuang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n-2) dan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1) dengan 4 sasaran strategis dan 10 kegiatan utama, anantara lain :

- a. Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap, dengan rincian kegiatan :
 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Meningkatnya prosentase DI kewenangan kabupaten yang terlayani, dengan rincian kegiatan :
 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.
- c. Tersedianya gedung pelayanan publik dan Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang, dengan rincian kegiatan :
 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung;
 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah



- Kabupaten/Kota;
- d. Meningkatnya distribusi air minum, dengan rincian kegiatan :
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel terlampir. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program / kegiatan Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran 20.943.647 dan realisasi sebesar 19.292.458.014 atau sebesar 92,22%, Dengan target indikator kinerja nilai sakip SKPD **"BB"**. Target nilai sakip BB tidak tercapai, karena kurangnya koordinasi antar bidang di Dinas PUPR dalam merealisasikan target tersebut. Untuk meningkatkan nilai SAKIP BB dibutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh bidang. Hal ini dimaksudkan agar hasil penilaian dan evaluasi bisa lebih baik lagi.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tiga kegiatan:

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar 144.901.600 dengan realisasi anggaran sebesar 99.812.512 atau sebesar 68,88%. Dengan target kinerja persentase persentase layanan administrasi SKPD 100%, dan terealisasi sebesar 100%.

Administrasi Umum Perangkat Daerah , memiliki dua sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan nilai anggaran sebesar 62.119.600 dengan realisasi anggaran sebesar 41.550.000 atau sebesar 66,88%. dengan target kinerja jumlah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebesar 4 paket, dan terealisasi sebesar 3 paket.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan nilai anggaran sebesar 82.782.000 dengan reakisasi sebesar 58.262.512 atau sebesar 70,38%, dengan target kinerja 31 laporan, dan terealisasi sebesar 26 laporan.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar 18.657.520.840 dengan realisasi sebesar 17.297.547.327 atau sebesar 92,71%. Dengan target kinerja persentase tersusunnya laporan keuangan SKPD 100%, dan terealisasi sebesar 100%. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki tiga sub kegiatan yakni:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan nilai anggaran 18.213.600.444 dengan realisasi anggaran sebesar 16.879.690.827 atau sebesar 92,68%. Dengan target kinerja jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 230 org/bln, dan terealisasi sebesar 228 org/bln.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar 422.060.896, dengan realisasi sebesar 395.997.000 atau sebesar 93,82%. Dengan target kinerja jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 2 (dua) laporan, dan terealisasi sebesar 2 (dua) laporan.
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar 21.859.500, dengan realisasi sebesar 21.859.500 atau sebesar 100%. Dengan target kinerja jumlah laporan keuangan



bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD 12 laporan dan terealisasi 12 laporan.

- c. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar 45.657.500 dengan realisasi sebesar 42.557.500 atau sebesar 93,21%. Dengan target kinerja persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% dan terealisasi sebesar 100%. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar 28.912.500, dengan realisasi sebesar 28.612.500 atau sebesar 98,67%. Dengan target kinerja jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 7 (tujuh) dokumen, dengan realisasi sejumlah 7 (tujuh) dokumen.
 - Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar 16.745.000, dengan realisasi sebesar 13.945.000 atau sebesar 83,28%. Dengan target kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen) 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen.
- d. Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar 1.219.520.640 dengan realisasi sebesar 1.054.981.060 atau sebesar 86,51%. Dengan target kinerja Persentase Tersediannya Penunjang Urusan SKPD 100% dan terealisasi 100%. Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 2 (dua) sub kegiatan yakni:
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar 1.186.976.640, dengan realisasi sebesar 1.022.869.060 atau sebesar 86,17%. Dengan target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dokumen) 12 (dua belas) dokumen dan terealisasi 12 (dua belas) dokumen.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar 32.544.000 dengan realisasi 32.112.000 atau sebesar 98,67%.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar 876.046.420 dengan realisasi sebesar 797.559.615 atau sebesar 91,04%. Dengan target kinerja Perentase Terpeliharannya Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Berat (%) 100% dan terealisasi 100%. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 2 (dua) sub kegiatan yakni:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar 183.807.500, dengan realisasi sebesar 155.723.975 atau sebesar 84,72%. Dengan target kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 60 Unit dan terealisasi 61 unit
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, dengan anggaran sebesar 692.238.920 dengan realisasi sebesar 641.835.640 atau sebesar 92,72%. Dengan target kinerja Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 19 unit dan terealisasi 19 unit.

2. Program : Pengelolaan SDA



Program Pengelolaan SDA memiliki anggaran 13.330.114.186 dan realisasi sebesar 11.419.763.069 atau sebesar 85.67%, Dengan target indikator kinerja Prosentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi 69,19%, dan teralisasi sebesar 69,19 .

Program pengelolaan SDA memiliki 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) subkegiatan yakni:

- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai anggaran sebesar 13.330.114.186 dan terealisasi sebesar 11.419.763.069 atau sebesar 85,67%. Dengan indicator kinerja Ketersediaan debit air per hektar 1,7 (Ltr/dtk/ha) dan terealisasi sebesar 1,7 (Ltr/dtk/ha). Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota memiliki 4 (empat) subkegiatan yakni:
 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, dengan nilai anggaran sebesar 177.330.000 dan terealisasi sebesar 177.236.000 atau sebesar 99,95%. Dengan indicator kinerja Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen) sebanyak 5 (lima) dokumen dan terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen.
 - Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya, dengan nilai anggaran sebesar 11.310.337.536 dan terealisasi sebesar 9.474.899.062 atau sebesar 73,77%. Dengan indicator kinerja Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya dengan jumlah embung yang di bangun 5 (lima) dan terbangun 0 (nol).
 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya, dengan nilai anggaran 1.511.056.150 dan terealisasi sebesar 1.479.177.000 atau sebesar 97,89%. Dengan indicator kinerja Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara 10 (Unit) dan dicapai 0 (unit)
 - 'Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan nilai anggaran 82.207.500 dan terealisasi 82.206.600 atau sebesar 99,99%. Dengan indicator kinerja Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 17 (Orang) dengan realisasi 34 orang
- b. Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam satu daerah kabupaten/kota dengan nilai anggaran sebesar 249.183.000 dengan realisasi 206.244.407. dan indicator kinerja Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 6 (Km) dan terealisasi 6 (km).
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan nilai anggaran 249.183.000 dan terealisasi sebesar 206.244.407 atau sebesar 82,77%. Dengan indicator kinerja. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 6 (Km) dan terealisasi 6 (km).
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan nilai anggaran sebesar 25.007.781.500 dan terealisasi sebesar 24.130.205.660 atau sebesar 96,49%. Indikator kinerja Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman 80,37 (%) dan terealisasi 80,76%. Program Pengelolaan Dan Pengembangan



Sistem Penyediaan Air Minum memiliki satu kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan yakni:

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Dengan nilai anggaran sebesar 25.007.781.500 dan terealisasi sebesar 24.130.205.660 atau sebesar 96,49%. Indikator kinerja Jumlah Masyarakat Terlayani dan Mengonsumsi Air bersih 1.967(KK) dan terealisasi sebesar 2.622 (kk).
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, dengan nilai anggaran 257.102.500 dan terealisasi sebesar 24.130.205.660 atau sebesar 96,49%. Dengan indikator kinerja Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun 3 (Dokumen, terealisasi 3 (dokumen).
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Dengan nilai anggaran 22.982.035.000 terealisasi sebesar 22.113.510.660 atau sebesar 96,49%. Dengan indikator kinerja Masyarakat Terlayani dan Mengonsumsi Air Bersih 185.718 KK . terealisasi sebesar 1.480 KK. Tidak teralisasinya capaian target kegiatan karena adanya rekofusing anggaran untuk penanganan covid19.
 - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dengan nilai anggaran sebesar 1.768.644.000 dan terealisasi sebesar 1.764.940.000 atau sebesar 99,79%. Dengan target capaian kinerja Jumlah Cakupan Akses Air Minum Layak dan terlayannya Sambungan Rumah 3.500 SR dan terealisasi 2.622 SR. capaian target kinerja ini tidak tercapai karena adanya pengurangan anggaran atau adanya rekofusing anggaran untuk penanganan covid19.
4. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan nilai anggaran sebesar 297.147.355.115 dan teralisasi sebesar 279.698.092.876 atau sebesar 94,13%. Dengan Indikator kinerja Presentase jalan kondisi mantap 17,13% dan teralisasi sebesar 72,94%. Target kinerja ini tidak tercapai disebabkan adanya perubahan alokasi dan DAU untuk peningkatan jalan. Program Penyelenggaraan Jalan memiliki 1 (satu) kegiatan dan 5(lima) subkegiatan yakni:
 - a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota dengan nilai anggaran sebesar, 297.147.355.115 dan teralisasi sebesar 279.698.092.876 atau sebesar 94,13%. Dengan indikator kinerja Panjang jalan mantap Kabupaten 592,588 Km dan teralisasi sebesar 590.69 Km. target kinerja ini tidak tercapai karena Pendanaan untuk pekerjaan jalan terutama peningkatan kondisi dan kapasitas jalan selama ini hanya bergantung pada DAK (Dana Alokasi Khusus) yang juga memiliki persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh beberapa ruas jalan. Dengan ditetapkannya pengusulan DAK dengan tematik DTW misalnya, menjadikan terbatasnya ruas jalan yang bisa diusulkan.
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan nilai anggaran 217.705.000 dan terealisasi sebesar 162.820.000 atau sebesar 74,79%, dengan target kinerja Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan dan Pengendalian 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen.
 - Survei Kondisi Jalan/ Jembatan dengan nilai anggaran 107.635.000 dan terealisasi 57.345.000 atau sebesar 53,28%, dengan target kinerja Data Base Kondisi Jalan dan Jembatan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
 - Rekontruksi Jalan dengan nilai anggaran sebesar 292.057.175.000 dan



- teralisasi sebesar 274.845.055.876 atau sebesar 94.11%. dengan target kinerja Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap 58 Km dan terealisasi 58 Km.
5. Program pengelolaan dan pengembangan air limbah, memiliki anggaran sebesar 7.180.583.835 dengan nilai realisasi sebesar 7.066.771.827 atau sebesar 98,42%. Program pengelolaan dan pengembangan air limbah memiliki target kinerja Persentase Irigasi Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik 100% dan tercapai sebesar 100%. Program pengelolaan dan pengembangan air limbah, memiliki 1(satu) kegiatan dan 1 subkegiatan yakni:
 - a. Pembangunan/pengembangan system air limbah domestic dalam daerah kabupaten/kota dengan nilai anggaran 7.180.583.835 dan terealisasi sebesar 7.066.771.827. Pembangunan/pengembangan system air limbah domestic memiliki target kinerja Jumlah Pengelolaan Air Limbah Domistik terbangun sebanyak 10 unit dan terbangun sebanyak 10 unit.
 - Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman memiliki anggaran 7.180.583.835 dan terealisasi sebesar 7.066.771.827. dengan target kinerja:
 - Pembangunan MCK sebanyak 10 unit dan terealisasi sebanyak 10 unit.
 - Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan sebanyak 7 lokasi dan sudah terbangun di 7 lokasi.
 - Pembangunan Tangki Septik Sekala Komunal di tiga lokasi dan sudah terbangun di 3 lokasi.
 6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki anggaran sebesar 526.210.182 dengan realisasi 454.939.955 atau sebesar 86.46%. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki target kinerja Jumlah Regulasi Tata Ruang yang Diterbitkan sebanyak 2 (dua) regulasi dan terealisasi sebanyak 2 (dua) regulasi. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki 1 (satu) kegiatan yakni:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai anggaran sebesar 122. 398.822 dan teralisasi sebesar 122.398.822 atau sebesar 90,42%. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota memiliki target kinerja Jumlah Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3 (tiga) kegiatan dan teralisasi sebanyak 3 (tiga) kegiatan.
 - b. Koordinasi dan Singkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai anggaran 142.647.360 dengan nilai realisasi sebanyak 84.669.614 atau sebesar 59,36%. Koordinasi dan Singkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang 500 kegiatan dan tercapai sebesar 515 kegiatan.
 - c. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar 261.164.000 dengan nilai realisasi sebesar 259.593.896 atau sebesar 99,40%. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota memiliki target kiner Jumlah perda dan perbup tata ruang sebanyak 2 perda dan pebup, target kinerja ini belum tercapai di tahun 2022 karena masih dalam proses konsolidasi dan asistensi dengan pihak provensi dan kementerian ATR.
 7. Program Penataan Bangunan Gedung memiliki anggaran senilai 6.043.384.695. dan terealisasi sebesar 5.936.823.285 atau sebesar 98,24%. Program Penataan Bangunan Gedung memiliki target kinerja Gedung Pemerintah Terbangun sebanyak 1 unit dan



terbangun sebanyak 1 unit. Program Penataan Bangunan Gedung memiliki satu kegiatan yakni:

- a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung memiliki anggaran senilai 6.043.384.695. dan terealisasi sebesar 5.936.823.285 atau sebesar 98,24%. Dengan target kinerja Pembangunan Mall Pelayanan Publik 1 unit dan terealisasi 1 unit.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang tentunya dapat mempengaruhi pencapaian maupun upaya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

- a. Sumber daya manusia berupa tenaga Teknis yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah masih minim, secara rasio komposisi tenaga teknis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Lombok Tengah yakni 30:70, dimana 30% merupakan tenaga dengan kualifikasi teknis dan 70% dengan kualifikasi umum. Komposisi diharapkan adalah 70% tenaga teknis dan 30% adalah tenaga umum, sehingga diharapkan pada tingkat operasional teknis pelaksanaan penyediaan infrastruktur dapat terlaksana secara maksimal dan dengan kualitas hasil pelaksanaan yang optimal.
- b. Sarana dan prasarana berupa peralatan penunjang pemeliharaan jalan belum memadai, seperti halnya alat-alat berat dan alat-alat pengujian bahan material konstruksi.
- c. Ketersediaan Basis Data kondisi infrastruktur masih minim. Diperlukan basis data infrastruktur yang baik dan valid pada seluruh sektor layanan seperti data layanan air minum, layanan pengolahan dan penyediaan SPAL (Sistem Pengolahan Air Limbah), kondisi dan sebaran jaringan irigasi, data jaringan dan kondisi ruas jalan kabupaten dan desa, sebaran dan pemanfaatan tata ruang dan lain-lain sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian target penyediaan infrastruktur di kabupaten Lombok Tengah.
- d. Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang, yang diakibatkan oleh keterbatasan jumlah personil yang menangani.
- e. Pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang pasca beroperasinya Kawasan KEK Mandalika dan pembangunan Jalan Bypass BIL-Mandalika.
- f. Alokasi anggaran untuk penyediaan infrastruktur publik dan penataan ruang masih rendah, baik alokasi pembiayaan yang bersumber dari DAU maupun alokasi yang dapat dibiayai melalui DAK pada setiap tahunnya, berbanding tebal dengan jumlah usulan pembiayaan yang direncanakan.

Selain permasalahan dan hambatan, terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan pelayanannya yakni :

- a. Tantangan yang dihadapi antara lain:
 - Penyediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap masih menjadi prioritas pertama masyarakat dalam hal penyediaan infrastruktur publik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya harapan masyarakat untuk memiliki akses jalan yang berkondisi layak dan mantap, baik berupa jalan kabupaten maupun jalan desa.
 - Kondisi jalan mantap kabupaten masih belum tersebar secara merata di setiap kecamatan maupun desa, yang pada akhirnya memicu kecemburuan masyarakat dan rasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah.



- Tingginya biaya penyediaan infrastruktur jalan baik pada tahap pembangunan maupun pemeliharaan jalan, dan hal ini berbanding terbalik dengan jumlah alokasi anggaran yang tersedia setiap tahunnya.
 - Meningkatnya jumlah penduduk dan tidak meratanya sebaran penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana air minum serta pengelolaan air limbah juga meningkat setiap tahun.
 - Banyaknya ruas jalan desa yang ingin ditingkatkan menjadi status jalan kabupaten, baik atas dasar usulan masyarakat langsung maupun penyampaian melalui lembaga Legislatif daerah.
 - Peraturan daerah tentang penataan ruang daerah yang masih minim dan belum sampai pada tingkat detail tata ruang daerah.
 - Belum optimalnya penindakan dan sangsi yang dikenakan atas penyalahgunaan dan pemanfaatan ruang.
- b. Peluang yang ada antara lain:
- Bertambahnya dukungan Kementrian/Lembaga yang menangani penyediaan infrastruktur publik daerah, terutama dalam upaya menunjang pengembangan kawasan KEK Mandalika dan meningkatkan kualitas daerah penunjang disekitar KEK Mandalika.
 - Minat dan kesadaran masarakat untuk mengetahui aturan pemanfaatan ruang semakin hari semakin meningkat.
- b. Masih terjalinya sinergi yang baik antara pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah dengan pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat dalam rangka kerjasama dan penyediaan infrastruktur publik, baik berupa dukungan program/kegiatan maupun dukungan anggaran.



2.2 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pekerjaan umum-tata ruang, solusi yang dilakukan harus disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat. Isu strategis menjabarkan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan pelayanan daerah; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah serta dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, capaian program nasional maupun internasional, seperti SPM dan SDG's; serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah. Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran.

a. Isu Strategis terkait yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah:

1. Belum optimalnya pemenuhan data pelayanan air minum, air limbah, dan drainase sehingga menyebabkan perencanaan yang dilakukan belum bisa memenuhi kebutuhan dan kondisi real di lapangan secara maksimal.
2. Capaian pelayanan air minum Lombok Tengah sampai dengan Tahun 2022 mencapai 80.37% dan sanitasi 100%.
3. Masih ada daerah rawan kekeringan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelayanan air bersih.
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya pemahaman masyarakat dalam perencanaan tata ruang, baik dalam tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
5. Belum optimalnya proses penetapan RUTR/RRTR (Rencana Umum Tata Ruang/ Rencana Rinci Tata Ruang) yang terkendala oleh substansi perpetaan yang perlu mendapatkan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial.
6. Terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan-kebijakan yang dijadikan rujukan perencanaan tata ruang.
7. Reformasi agrarian (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/ Kota belum tertangani dengan optimal
8. Adanya pandemic Covid-19 di seluruh negeri menyebabkan pemotongan anggaran yang dialihkan untuk penanganan covid-19 serta pelaksanaan kegiatan yang tertunda akibat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah.

b. Isu Strategis Penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 (UndangUndang Cipta Kerja)

Pada Tahun 2020 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang UU No 11 Tahun 2020, atau yang lebih dikenal dengan UU Cipta Kerja, yang dibentuk dengan tujuan untuk :

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industry dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja



- Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
 3. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industry nasional
 4. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan system peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada Pancasila.
 5. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, UU Cipta Kerja menagtur mengenai kebijakan strategis yang meliputi :
 - a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
 - b. Ketenaga kerjaan
 - c. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM
 - d. Kemudahan berusaha
 - e. Dukungan riset dan inovasi
 - f. Pengadaan tanah
 - g. Kawasan ekonomi
 - h. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional
 - i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan
 - j. Pengenaan sanksi

Dengan diundangkannya Undang Undang ini maka terjadi perubahan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan salah satu bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun kebijakan penataan ruang dalam kerangka UU Cipta Kerja ini adalah isu resentralisasi kewenangan penyelenggaraan penataan ruang yang mempunyai implikasi terhadap proses dan prosedur penataan ruang di daerah, yaitu :

- Perijinan berbasis RDTR
- Penyederhanaan produk Rencana Tata Ruang
- Percepatan penetapan RTRW dan RDTR

Terdapat beberapa perubahan antara ketentuan dalam UUCK dengan peraturan perundangan tentang penataan ruang yang sebelumnya, antara lain terkait Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Pengadaan Tanah, Kawasan Ekonomi dan Investasi, dan Proyek Strategis Nasional. Beberapa Poin substansial perubahan tersebut meliputi :

- a. Perubahan perizinan pemanfaatan ruang menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. Penambahan penanganan ketidaksesuaian pola ruang dengan kawasan hutan dan hak atas tanah;
- c. Penambahan klausul bantek dan bintek;
- d. Penghapusan klausul dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk KSN;
- e. Penghapusan klausul penyebarluasan informasi APZ Nasional;
- f. Kewenangan Pemprov dan Pemkab/Pemkot terhadap KSP dan KSK dihapus, termasuk RTR KSP dan KSK dihapus dari nomenklatur rencana rinci tata ruang;
- g. Angka minimal kawasan hutan seluas 30% sebagai syarat pelestarian lingkungan dihapus, diganti sesuai kondisi kawasan (DAS, biogeofisik, iklim, penduduk, social ekonomi);
- h. Proses perencanaan RDTR tanpa porses legislasi (ditetapkan melalui
- i. Perkada);



- j. Adanya tenggat waktu penetapan RTR pasca Persub Pertimbangan Pertimbangan KSP dan KSK terhadap RTRW Prop dan RTRW Kab/Kota dihapus;
- k. Kebijakan Nasional yang bersifat strategis tetapi belum termuat di RTR dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan dari Pusat;
- l. Persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Pusat;
- m. Agropolitan dan kawasan perdesaan dihapus/tidak lagi diatur dalam taraf UU;
- n. Syarat penetapan sebuah pelanggaran pemanfaatan ruang adalah harus mengakibatkan perubahan fungsi ruang;

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan Langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat, sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Berikut reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 pada Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah :



Tabel 2.6
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				361,203,518,970					361,203,518,970	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23,570,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23,570,000,000	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80,000,000	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30,000,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19,335,000,000	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19,335,000,000	



Tabel 2.6
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lombok Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang/bln	18,750,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lombok Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang/bln	18,750,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	550,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	550,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Seme SKPD	20 Laporan	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan /Seme SKPD	20 Laporan	35,000,000	
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah				410,000,000	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah				410,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lombok Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	185,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lombok Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	185,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	225,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	225,000,000	
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,545,000,000	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,545,000,000	



Tabel 2.6
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lombok Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,500,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lombok Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,500,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lombok Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	45,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lombok Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	45,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lombok Tengah			2,200,000,000	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lombok Tengah			2,200,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lombok Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	450,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lombok Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	450,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Lombok Tengah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	29 Unit	1,750,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Lombok Tengah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	29 Unit	1,750,000,000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				50,295,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				53,223,070,000	
	6 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				49,045,000,000	6 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				49,045,000,000	



Tabel 2.6
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Lombok Tengah	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	5 Dokum en	575,000,000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Lombok Tengah	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	5 Dokum en	575,000,000	
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Lombok Tengah	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	16 Unit	45,720,000,000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Lombok Tengah	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	16 Unit	45,720,000,000	
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Lombok Tengah	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	21 Unit	2,750,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Lombok Tengah	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	21 Unit	2,750,000,000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1,250,000,000	7 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4,178,070,000	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Lombok Tengah	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.75 Km	1,250,000,000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Lombok Tengah	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5.85 Km	4,178,070,000	Penambahan panjang jaringan irigasi yg akan direhabilitasi.



Tabel 2.6
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				43,876,800,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				45,425,900,000	
8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				43,876,800,000	8 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				45,425,900,000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Lombok Tengah	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	6 Dokumen	525,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Lombok Tengah	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	6 Dokumen	525,000,000	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Lombok Tengah	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	108 SR00	24,850,900,000	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Lombok Tengah	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	108 SR00	24,850,900,000	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Lombok Tengah	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	108 SR0	13,750,000,000	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Lombok Tengah	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	108 SR0	13,750,000,000	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Lombok Tengah	Jumlah masyarakat terlayani Air Bersih	750 KK	4,750,900,000	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah masyarakat terlayani Air Bersih	100 KK0	6,300,000,000	



Tabel 2.6
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				7,300,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				12,175,000,000	
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				7,300,000,000	9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			12,175,000,000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lombok Tengah	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	4 Dokumen	300,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lombok Tengah	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	4 Dokumen	300,000,000	
	Rehabilitasi/Peningkatan/Per luasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Lombok Tengah	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	200 KK	1,500,000,000	Rehabilitasi/Peningkatan/Per luasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Lombok Tengah	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	300 KK	2,250,000,000	Penambahan jumlah target penerima SPALD-T
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Lombok Tengah	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200 KK	5,500,000,000	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Lombok Tengah	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	350 KK	9,625,000,000	Penambahan jumlah target penerima SPALD-T
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				7,000,000,000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				4,500,000,000	



Tabel 2.6
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
10	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				7,000,000,000	10 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				4,500,000,000	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Mall Peyananan Publik & Gedung Kantor Bupati	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2,500,000,000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Mall Peyananan Publik & Gedung Kantor Bupati	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1,000,000,000	Review DED Mall Pelayanan Publik & DED Landscape Kantor Bupati
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Mall Peyananan Publik & Gedung Kantor Bupati	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	2 Unit	4,500,000,000	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Mall Peyananan Publik & Gedung Kantor Bupati	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	2 Unit	3,500,000,000	Penyesuaian nilai Pembiayaan Rehabilitasi Mall Pelayanan Publik & Kantor Bupati
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				1,500,000,000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				1,500,000,000	
	11 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				1,500,000,000	11 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				1,500,000,000	



Tabel 2.6
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Eks Kantor Bupati	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1,500,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Eks Kantor Bupati	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1,500,000,000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				226,031,718,970	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				219,179,548,970	
	1 Penyelenggaraan Jalan 2 Kabupaten/Kota				226,031,718,970	1 Penyelenggaraan 2 Jalan Kabupaten/Kota				219,179,548,970	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	4 Dokumen	475,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	4 Dokumen	475,000,000	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Lombok Tengah	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	275,000,000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Lombok Tengah	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	275,000,000	
	Rekonstruksi Jalan	Lombok Tengah	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	38.8 Km 9	188,081,218,970	Rekonstruksi Jalan	Lombok Tengah	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	50.2 Km 9	176,015,000,000	Penambahan Panjang jalan yg akan di Rekonstruksi.

Tabel 2.6
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Rehabilitasi Jalan	Lombok Tengah	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20.5 Km	20,250,000,000	Rehabilitasi Jalan	Lombok Tengah	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20.5 Km	20,250,000,000	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Lombok Tengah	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	3 Km	1,950,000,000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Lombok Tengah	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	15.5 Km	8,755,148,970	Penambahan Panjang jalan yg akan di rehabilitasi secara berkala.
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Lombok Tengah	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	218 Km	8,750,500,000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Lombok Tengah	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	218 Km	8,750,500,000	
	Penggantian Jembatan	Lombok Tengah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	65 M	5,600,000,000	Penggantian Jembatan	Lombok Tengah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	35 M	3,013,500,000	Pengurangan panjang jembatan yg akan diganti.
	Rehabilitasi Jembatan	Lombok Tengah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	15 M	650,000,000	Rehabilitasi Jembatan	Lombok Tengah	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	38 M	1,645,400,000	Penambahan panjang jembatan yg akan direhab.
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				330,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				330,000,000	
13	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				250,000,000	13 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				250,000,000	
	Penyiapan Training Need Assessment (TNA)	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga	1 Dokumen	250,000,000	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga	1 Dokumen	250,000,000	



Tabel 2.6
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli			Tenaga Terampil Konstruksi		Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli			
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lombok Tengah			80,000,000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Lombok Tengah			80,000,000	
	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Lombok Tengah	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	2 Dokumen	80,000,000	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha		Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	2 Dokumen	80,000,000	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1,300,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1,300,000,000	
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				650,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				650,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	450,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	450,000,000	
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	2 Dokumen	200,000,000	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	2 Dokumen	200,000,000	
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				350,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				350,000,000	



Tabel 2.6
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1 6	Sistem Informasi Penataan Ruang	Lombok Tengah	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	350,000,000	Sistem Informasi Penataan Ruang	Lombok Tengah	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	350,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				300,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				300,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	300,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	300,000,000	





2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyedia dan pengelola infrastruktur publik, Dinas PUPR dlaam menetapkan program dan kegiatan tentunya juga mengacu kebutuhan masyarakat. Usulan dan keinginan masyarakat telah disampaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan yakni melalui Musrenbang, baik Murenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, hingga Musrenbang Tingkat Kabupaten (Forum SKPD).

Dalam Musrenbang yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2023, yang diikuti oleh seluruh kecamatan lingkup kabupaten Lombok Tengah atau sejumlah 12 kecamatan telah dirangkum seluruh usulan yang berkenaan dengan penyediaan infrastruktur dasar publik. Usulan-usulan masyarakat ini tentunya tidak dapat seluruhnya dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah, karna keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten Lombok Tengah. Namun Dinas PUPR akan tetap berusaha memenuhinya melalui kerjasama dan pengusulan dukungan pembiayaan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah Pusat.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WSI) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2. Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 	<p>Ke. Pujut dan Praya Timur.</p> <p>Kec. Janapria, Praya Timur dan Pujut</p> <p>Kec. Praya Timur, Praya Barat, Praya Tengah, Janapria dan Pujut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan/R ehabilitasi Jaringan Irigasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi 	<p>3 Daerah Irigasi</p> <p>3 Daerah Irigasi</p> <p>5 Daerah Irigasi</p>	



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> - Rekontruksi Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan - Sub Kegiatan : Pelebaran Jembatan - Pemeliharaan Berkala Jembatan 	Lombok Tengah Kec. Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Praya, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Tengah, dan Pujut . Kec. Batukliang, Jonggat, Pringgarata, Praya Barat Daya dan Pujut. Lombok Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap - Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran. Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan. Secara Berkala 	102 Km 54,7 Km 45 M 110 M	
3	PROGRAM PENATAAN DESA 1. Penyelenggaraan Penataan Desa <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 	Kec. Praya Barat, Kec. Batukliang, Batukliang Utara, Pringgarata dan Pujut.	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Desa dalam kondisi baik dan mantap 	23,6 Km	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 	Lombok Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Perencanaan 	2 Dokumen	



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dengan Visi dan Misi Kementerian PUPR RI adalah : *"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"* dengan Misi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian PUPR RI Tahun 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Dengan Sasaran Strategis Kementrian PUPR RI Tahun 2020-2024 yakni :

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - (3) Kapasitas tampung per kapita;
 - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
 - (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis; (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Dari uraian misi, tujuan, dan sasaran Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020- 2024 di atas terdapat point yang selaras dengan apa yang akan



dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada point meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA (Sumber Daya Air), meningkatnya konektifitas jaringan jalan nasional dan meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional. Keselarasan ini dapat terlihat dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat.

No.	Sasaran Renstra Kementrian PUPR RI Tahun 2020- 2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA.	Layanan air irigasi belum merata akibat kondisi jaringan irigasi yang masih dibawah standar.	Kondisi konstruksi jaringan irigasi kabupaten dibawah standar masih tinggi.	Kebutuhan masyarakat petani akan ketersediaan air yang mencukupi untuk layanan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.
			Masih rendahnya alokasi anggaran peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.	
			Kurangnya jumlah embung, bendung atau tampungan air sebagai alternatif penyediaan air irigasi.	
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Masih tingginya jumlah ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap.	Penanganan peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang rendah disetiap tahun.	Tingginya kebutuhan akan jalan kabupaten dengan kondisi mantap yang terkoneksi dengan jaringan jalan nasional.
			Terbatasnya alokasi anggaran	



No.	Sasaran Renstra Kementrian PUPR RI Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			daerah untuk peningkatan kualitas jalan kabupaten.	
			Alokasi utama penanganan jalan masih mengandalkan anggaran DAK pemerintah pusat.	
			Semakin banyak ruas jalan desa dan jalan non status yang ditingkatkan menjadi status jalan kabupaten.	
3	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Peningkatan kualitas SDM bidang konstruksi masih belum dilakukan secara optimal.	Belum tersedianya basis data SDM bidang konstruksi lingkup kabupaten.	Kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yang semakin meningkat pada proyek konstruksi skala lokal dan regional.
			Rendahnya jumlah pelatihan dan pembinaan SDM bidang konstruksi oleh yang diinisiasi pemerintah daerah.	

3.1.2 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi NTB.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2024 yaitu : **“Terwujudnya RUANG Hunian yang Ideal dilengkapi**



Jalan mantap, Air lestari dan Utilitas umum (RUANG HIJAU) melalui Gerakan Membangun Infrastruktur yang Cemerlang (GEMILANG) “ dengan 8 misi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang profesional dan akuntabel;
2. Mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keseimbangan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan secara terpadu dalam pengembangan wilayah;
4. Meningkatkan kehandalan layanan sumber daya air;
5. Meningkatkan kemantapan jalan guna mendukung sektor unggulan dan kawasan strategis;
6. Meningkatkan cakupan layanan air minum dan sanitasi serta kualitas penataan bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan;
7. Meningkatkan daya saing jasa konstruksi yang unggul dan kompetitif;
8. Meningkatkan profesionalisme dan independensi pengendalian mutu material konstruksi.

Tujuan ingin dicapai oleh Dinas PUPR Provinsi NTB berdasarkan Misi yang ada didalam RPJMD 2018 – 2023 (masuk dalam Misi I, Misi IV, dan Misi V) dapat dipilah menjadi 4 yaitu :

1. Pulihnya infrastruktur yg rusak akibat bencana gempa bumi;
2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar;
3. Meningkatnya kualitas dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin.

Dari 4 tujuan tersebut secara lebih rinci terbagi menjadi 10 Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas PUPR Provinsi NTB yaitu :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan gedung perkantoran/ publik pasca bencana gempa bumi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
3. Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap;
4. Meningkatnya ketersediaan air irigasi, dan mengurangi resiko bencana;³⁴
5. Meningkatnya profesionalisme dan independensi pengawasan mutu infrastruktur;
6. Meningkatnya industri konstruksi yang kompetitif;
7. Meningkatnya konsistensi dan keselarasan infrastruktur ke PU-an;
8. Meningkatnya sarana prasarana umum pada kawasan strategis;
9. Melaksanakan percepatan penataan ruang pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
10. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan air limbah.

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran Dinas PUPR Provinsi NTB terdapat beberapa point yang selaras dengan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan



Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, yakni persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap, meningkatnya ketersediaan air irigasi serta mengurangi resiko daya rusak air dan meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan air limbah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB.

NO	Sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Masih tingginya jumlah ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap, yang mendukung akses terhadap jalan provinsi.	Penanganan peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang rendah disetiap tahun.	Tingginya kebutuhan akan jalan kabupaten dengan kondisi mantap yang terkoneksi dengan jaringan jalan provinsi.
			Terbatasnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan kualitas jalan kabupaten.	
			Alokasi utama penanganan jalan masih mengandalkan anggaran DAK pemerintah pusat.	
			Semakin banyak ruas jalan desa dan jalan non status yang ditingkatkan menjadi status jalan kabupaten.	
2	Meningkatnya ketersediaan air	Layanan air irigasi belum merata	Kondisi konstruksi	Kebutuhan masyarakat



NO	Sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2020- 2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	irigasi serta mengurangi resiko daya rusak air.	akibat kondisi jaringan irigasi yang masih dibawah standar.	jaringan irigasi kabupaten dibawah standar masih tinggi. Masih rendahnya alokasi anggaran peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kurangnya jumlah embung, bendung atau tampungan air sebagai alternatif penyediaan air irigasi.	petani akan ketersediaan air yang mencukupi untuk layanan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan air limbah	Belum meratanya sebaran layanan air minum lingkup kabupaten.	Jarak dan sebaran pemukiman penduduk yang berjauhan antara permukiman satu dengan permukiman lain.	Kebutuhan akan ketersediaan air minum yang tinggi.
			Terbatasnya sumber mata air.	
			Kondisi tofografi permukiman.	
			Tingginya biaya dan rendahnya alokasi anggaran penyediaan sarana pendistribusian air minum.	
		Belum meratanya penyediaan	Rendahnya kemampuan individu dalam	Semakin tingginya kesadaran dan



NO	Sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pengelolaan air limbah.	penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah rumah tangga/domestik.	minat masyarakat akan pengelolaan air limbah rumah tangga/domestik.
			Terbatasnya lahan dalam rangka penyediaan pengolahan limbah rumah tangga/domestik.	
			Masih rendahnya alokasi anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik.	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

3.2.1 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

Tujuan yang dimaksud adalah merupakan penjabaran Visi-Misi Bupati Lombok Tengah serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan target pencapaian dalam kurun waktu 1 (Satu) hingga 5 (Lima) Tahun.

Tujuan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah merupakan permasalahan pokok bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang pekerjaan umum dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Lombok Tengah, dimana Visinya adalah “Mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, bermutu, maju, dan berbudaya” dengan misi sebagai berikut:

1. Merawat akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Mencapai SDM yang cerdas, mandiri, dan unggul;
3. Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat, dan bersih;



4. Pembangunan ekonomi yang berkeimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas (merupakan misi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah);
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Berdasarkan Visi-Misi Bupati Lombok Tengah, telaahan terhadap Visi-Misi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Visi-Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta dengan mencermati kondisi terkini dan isu-isu strategis yang kemudian dirumuskan dan dianalisa, maka dirumuskanlah Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 2021-2026 yaitu **“Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur Publik yang merata dan berkelanjutan”** dengan indikator berupa Indeks konektifitas, Indeks kinerja sistem irigasi, Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik, Ketaatan terhadap RTRW, Cakupan Layanan Air Minum, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

3.2.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

Sasaran strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART, yaitu khusus (specific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic), dan tepat waktu (time bound).

Adapun Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan jalan kabupaten dalam kondisi mantap;
2. Meningkatnya prosentase DI kewenangan kabupaten yang terlayani;
3. Tersedianya gedung pelayanan publik dan ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang;
4. Meningkatnya distribusi air minum;

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2023 beserta indikator sasarannya diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
1			Indeks Konektivitas	73,022	86.51



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Sasaran : Meningkatkan jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Presentase jalan dalam kondisi mantap	76.43	86.58
2	Meningkatkan Cakupan Layanan Sistem Jaringan Irigasi Kabupaten		Indeks kinerja sistem irigasi	61,1	66.10
		Sasaran : Meningkatkan prosentase DI kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	Rasio Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	73,53	84.92
3	Tersedianya Pusat layanan Publik dan meningkatnya ketaataan ruang		Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik Ketaatan terhadap RTRW	0	0
		Sasaran : Tersedianya gedung pelayanan publik dan ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang	Gedung Pemerintah Terbangun Tepat waktu	1	3
			Presentase pemenuhan regulasi Tata Ruang	85,71	83.70
4	Meningkatnya Akses Air Minum		Cakupan Layanan Air Minum	78.28	79,28
		Sasaran : Meningkatkan	Menurunya presentase	17.09	8.55



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
		distribusi air minum	kawasan rawan air minum		

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah di atas, maka diwujudkan kedalam 8 Program dengan 15 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan prioritas Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam Rencana Kerja Tahun 2024, yaitu:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan :
- 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan :

6 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan :
- 1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - 2 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
 - 3 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
 - 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

7 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan :
- 1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

8 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan :
- 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - 2 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - 3 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH



- Kegiatan : **9 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- Sub Kegiatan : **1 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman**

5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

- Kegiatan : **1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**
- Sub Kegiatan : **1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**

6 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

- Kegiatan : **1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**
- Sub Kegiatan : **1**
- 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - 2 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - 3 Rekonstruksi Jalan
 - 4 Pemeliharaan Berkala Jalan
 - 5 Pemeliharaan Rutin Jalan

7 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

- Kegiatan : **1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**
- Sub Kegiatan : **2**
- 1 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- Kegiatan : **1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**
- Sub Kegiatan : **1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota**
- 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
- 4 Kabupaten/Kota**



Sub 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
Kegiatan untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
n :

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan

5 Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sub 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan
Kegiatan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
n :



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Renstra Dinas PUPR 2021-2026, serta memperhatikan isu-isu strategis dan arah kebijakan nasional, maka disusunlah Rencana Pendanaan Tahun 2024 untuk Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yang dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 4.1
Rencana Kerja Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pagu Sesuai Kebutuhan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						134.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	3.677.404.934,00		185.107.445.342,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						129.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	8.677.404.934,00		185.107.445.342,00
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						134.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	3.677.404.934,00		185.107.445.342,00
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD			BB Predikat	BB Predikat	23.791.039.252,00	25.043.775.553,00	25.043.775.553,00	4.440.906.090,00		28.231.945.342,00
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen		37.872.440,00	37.782.440,00	37.782.440,00	90.000,00		94.650.000,00
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	22.132.420,00	22.042.420,00	22.042.420,00	90.000,00		48.900.000,00
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan SKPD			2 Laporan	2 Laporan	15.740.020,00	15.740.020,00	15.740.020,00	-		45.750.000,00
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			2 Dokumen		16.549.109.902,00	17.461.570.963,00	17.461.570.963,00	912.461.061,00		16.377.295.342,00
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2520 Orang/bulan	2520 Orang/bulan	16.177.295.522,00	17.119.234.583,00	17.119.234.583,00	941.939.061,00		16.177.295.342,00
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Bertambah/Berkurang (10-12)	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	358.820.000,00	329.342.000,00	329.342.000,00	- 29.478.000,00		150.000.000,00
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Laporan	5 Laporan	12.994.380,00	12.994.380,00	12.994.380,00	-		50.000.000,00
	1.03.01.2.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			2 Dokumen		96.704.000,00	105.704.000,00	105.704.000,00	9.000.000,00		120.000.000,00
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6 Laporan	6 Laporan	96.704.000,00	105.704.000,00	105.704.000,00	9.000.000,00		120.000.000,00
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Dokumen		1.429.520.640,00	1.425.215.040,00	1.425.215.040,00	- 4.305.600,00		1.495.000.000,00
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	1.396.976.640,00	1.392.671.040,00	1.392.671.040,00	- 4.305.600,00		1.450.000.000,00
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	-	32.544.000,00	32.544.000,00	32.544.000,00		45.000.000,00
	1	NON URUSAN						129.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	8.677.404.934,00		185.107.445.342,00
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						134.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	3.677.404.934,00		185.107.445.342,00
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						129.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	8.677.404.934,00		185.107.445.342,00
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						134.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	3.677.404.934,00		185.107.445.342,00
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Kawasan 39 Unit		5.677.832.270,00	6.013.503.110,00	6.013.503.110,00	335.670.840,00		10.145.000.000,00
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Unit	12 Unit	230.332.270,00	235.778.270,00	235.778.270,00	5.446.000,00		145.000.000,00
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar											
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			29 Unit	29 Unit	447.500.000,00	377.724.840,00	377.724.840,00	69.775.160,00		1.250.000.000,00
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	-	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00		8.750.000.000,00
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik			-	84,92 %	3.094.821.500,00	16.906.364.496,00	16.906.364.496,00	3.875.678.500,00		6.970.500.000,00
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik			-	1,7 litr/atik/Ha	772.404.000,00	4.728.431.680,00	4.728.431.680,00	3.956.027.680,00		2.210.000.000,00
	1.03.02.2.01.0068	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya											
			Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang			-	0 Penampu	720.000.000,00	4.229.630.680,00	4.229.630.680,00	3.509.630.680,00		1.500.000.000,00



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>Dioperasikan dan Dipelihara</i>				ng Air Alami						
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan</i>			12 Lembaga	12 Lembaga	52.404.000,00	99.474.000,00	99.474.000,00	47.070.000,00		135.000.000,00
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai											
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>			-	4 Dokumen		399.327.000,00	399.327.000,00	399.327.000,00		575.000.000,00
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Irigasi Primer dan skunder pada DI yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			-	13 DI	232.241.500,00	12.177.932.816,00	12.177.932.816,00	9.855.515.316,00		4.760.500.000,00
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan											
2	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman			83.46 84.92 %	83.46 %	9.411.617.000,00	38.874.517.500,00	38.874.517.500,00	3.588.383.000,00		13.000.000.000,00
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah masyarakat (SR) terlayani dan mengkonsumsi Air Bersih</i>			13 DI 2012 SR	2012 SR	9.411.617.000,00	38.874.517.500,00	38.874.517.500,00	29.462.900.500,00		13.000.000.000,00
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan											
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)											
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan											
			<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>			2200 SR	2200 SR	9.411.617.000,00	13.263.058.000,00	13.263.058.000,00	3.851.441.000,00		12.750.000.000,00
3	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase Akses Sanitasi			-	100 %	10.193.832.000,00	12.951.532.000,00	12.951.532.000,00	1.306.168.000,00		11.500.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Layak dan Aaman										
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan air limbah domestik			30 kk	2 Unit	10.193.832.000,00	12.951.532.000,00	12.951.532.000,00	2.757.700.000,00		11.500.000.000,00
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman											
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun			200 M ³ /Hari	200 M ³ /Hari	10.193.832.000,00	12.951.532.000,00	12.951.532.000,00	2.757.700.000,00		11.500.000.000,00
4	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung Pemerintah Terbangun			3 Unit	3 Unit	3.497.236.160,00	6.527.723.660,00	6.527.723.660,00	2.763.840,00		3.500.000.000,00
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-					3.497.236.160,00	6.527.723.660,00	6.527.723.660,00	3.030.487.500,00		3.500.000.000,00
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala			2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	3.497.236.160,00	6.527.723.660,00	6.527.723.660,00	3.030.487.500,00		3.500.000.000,00
5	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan mantap			86.58 %	86.58 %	84.401.008.000,00	37.431.006.887,00	37.431.006.887,00	37.273.992.000,00		121.675.000.000,00
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan mantap Kabupaten			701.28 Km	701.28 Km 701.28 Km	84.401.008.000,00	37.431.006.887,00	37.431.006.887,00	46.970.001.113,00		121.675.000.000,00
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan											
			Jumlah Dokumen Rencana,			-	1 Dokumen	-	123.908.700,00	123.908.700,00	123.908.700,00		175.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun										
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi			30 KM	30 KM	84.191.008.000,00	28.310.988.600,00	28.310.988.600,00	- 55.880.019.400,00		115.000.000.000,00
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan											
			Jumlah Jembatan yang Dibangun			-	4 Jembatan	-	8.393.800.000,00	8.393.800.000,00	8.393.800.000,00		2.750.000.000,00
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan											
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			85 KM	85 KM	210.000.000,00	602.309.587,00	602.309.587,00	392.309.587,00		3.750.000.000,00
6	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan			-	2 Regulasi	-	332.038.750,00	332.038.750,00	230.000.000,00		230.000.000,00
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah perda dan perbup tata ruang			-	2 Perda	-	227.322.334,00	227.322.334,00	227.322.334,00		-
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota											
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi			-	1 Dokumen	-	227.322.334,00	227.322.334,00	227.322.334,00		-
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang			-	600 Kegiatan	-	49.597.576,00	49.597.576,00	49.597.576,00		125.000.000,00
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			-	5 Kegiatan	-	55.118.840,00	55.118.840,00	55.118.840,00		105.000.000,00
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang											
	JUMLAH							134.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	3.677.404.934,00		185.107.445.342,00





BAB V
PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini dijadikan sebagai bahan acuan guna penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan secara optimal, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian diantaranya :

1. Dukungan dan kerjasama seluruh komponen pegawai yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi dan konsolidasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan DPRD menjadi sesuatu hal yang sangat penting, dimana menyangkut kebijakan alokasi anggaran dan penyerapan keinginan serta aspirasi masyarakat melalui wakil-wakil mereka. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik diharapkan program kegiatan yang direncanakan mendapatkan alokasi pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan.
3. Peran serta dan dukungan seluruh masyarakat maupun seluruh unsur serta kelompok-kelompok swadaya yang ada sangat diperlukan terutama pada tingkat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dilapangan, sehingga penyediaan infrastruktur tersebut dapat tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
4. Meningkatkan komunikasi dan jalinan kerjasama dengan pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat terutama dengan Kementerian Teknis terkait, dalam rangka sinergitas program kegiatan maupun dukungan pembiayaan yang pada akhirnya mampu menunjang pencapaian program pembangunan prioritas pemerintah kabupaten Lombok Tengah.

Praya, Juli 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah,



Ir. LALU RAHADIAN, M.Si.
NIP. 196712311992031117

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2024																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								134.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	3.677.404.934,00						185.107.445.342,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							129.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	8.677.404.934,00							185.107.445.342,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							134.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	3.677.404.934,00							185.107.445.342,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD				BB Predikat	BB Predikat	23.791.039.252,00	25.043.775.553,00	25.043.775.553,00	4.440.906.090,00							28.231.945.342,00		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				3 Dokumen		37.872.440,00	37.782.440,00	37.782.440,00	-90.000,00			-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		94.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	22.132.420,00	22.042.420,00	22.042.420,00	-90.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan			48.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.740.020,00	15.740.020,00	15.740.020,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan			45.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				2 Dokumen		16.549.109.902,00	17.461.570.963,00	17.461.570.963,00	912.461.061,00			-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		16.377.295.342,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2520 Orang /bulan	2520 Orang /bulan	16.177.295.522,00	17.119.234.583,00	17.119.234.583,00	941.939.061,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan			16.177.295.342,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	358.820.000,00	329.342.000,00	329.342.000,00	-29.478.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	12.994.380,00	12.994.380,00	12.994.380,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				2 Dokumen		96.704.000,00	105.704.000,00	105.704.000,00	9.000.000,00			-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	96.704.000,00	105.704.000,00	105.704.000,00	9.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				1 Dokumen		1.429.520.640,00	1.425.215.040,00	1.425.215.040,00	-4.305.600,00			-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		1.495.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.396.976.640,00	1.392.671.040,00	1.392.671.040,00	-4.305.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan			1.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	32.544.000,00	32.544.000,00	32.544.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan			45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	NON URUSAN							129.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	8.677.404.934,00							185.107.445.342,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							134.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	3.677.404.934,00							185.107.445.342,00		
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							129.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	8.677.404.934,00							185.107.445.342,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							134.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	3.677.404.934,00							185.107.445.342,00		
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				1 Kawasan 39 Unit		5.677.832.270,00	6.013.503.110,00	6.013.503.110,00	335.670.840,00			-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		10.145.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	230.332.270,00	235.778.270,00	235.778.270,00	5.446.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan			145.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	447.500.000,00	377.724.840,00	377.724.840,00	-69.775.160,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan			1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana			8.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik				-	84.92 %	3.094.821.500,00	16.906.364.496,00	16.906.364.496,00	3.875.678.500,00							6.970.500.000,00		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik				-	1,7 litr/dtk/Ha	772.404.000,00	4.728.431.680,00	4.728.431.680,00	3.956.027.680,00			-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		2.210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0068	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya																			
			Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				-	0 Penampu ng Air Alami	720.000.000,00	4.229.630.680,00	4.229.630.680,00	3.509.630.680,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				12 Lembaga	12 Lembaga	52.404.000,00	99.474.000,00	99.474.000,00	47.070.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan			135.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				-	4 Dokumen	0,00	399.327.000,00	399.327.000,00	399.327.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi 7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi			575.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Irigasi Primer dan skunder pada DI yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	13 DI	2.322.417.500,00	12.177.932.816,00	12.177.932.816,00	9.855.515.316,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi 7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		4.760.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
2.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman				83.46 84.92 % %	83.46 %	9.411.617.000,00	38.874.517.500,00	38.874.517.500,00	3.588.383.000,00							13.000.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat (SR) terlayani dan mengkonsumsi Air Bersih				13 DI 2012 SR	2012 SR	9.411.617.000,00	38.874.517.500,00	38.874.517.500,00	29.462.900.500,00			-	- -	-		13.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				2200 SR	2200 SR	9.411.617.000,00	13.263.058.000,00	13.263.058.000,00	3.851.441.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN	-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan			12.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Akses Sanitasi Layak dan Aaman				-	100 %	10.193.832.000,00	12.951.532.000,00	12.951.532.000,00	1.306.168.000,00							11.500.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan air limbah domisti				30 kk	2 Unit	10.193.832.000,00	12.951.532.000,00	12.951.532.000,00	2.757.700.000,00			-	8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	-		11.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				200 M³/Hari	200 M³/Hari	10.193.832.000,00	12.951.532.000,00	12.951.532.000,00	2.757.700.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUG ASAN	-	8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana			11.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung Pemerintah Terbangun				3 Unit	3 Unit	3.497.236.160,00	6.527.723.660,00	6.527.723.660,00	2.763.840,00							3.500.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-						3.497.236.160,00	6.527.723.660,00	6.527.723.660,00	3.030.487.500,00			-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	3.497.236.160,00	6.527.723.660,00	6.527.723.660,00	3.030.487.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan mantap				86.58 %	86.58 %	84.401.008.000,00	37.431.006.887,00	37.431.006.887,00	37.273.992.000,00							121.675.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan mantap Kabupaten				701.28 Km	701.28 Km	84.401.008.000,00	37.431.006.887,00	37.431.006.887,00	-46.970.001.113,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi 7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		121.675.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				-	1 Dokumen	0,00	123.908.700,00	123.908.700,00	123.908.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi 7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi			175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				30 KM	30 KM	84.191.008.000,00	28.310.988.600,00	28.310.988.600,00	-55.880.019.400,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN DAK FISIK-BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN-AF IRMASI	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi 7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi			115.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				-	4 Jembatan	0,00	8.393.800.000,00	8.393.800.000,00	8.393.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi 7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi			2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				85 KM	85 KM	210.000.000,00	602.309.587,00	602.309.587,00	392.309.587,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi 7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi			3.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan				-	2 2 Regulasi Regulasi	0,00	332.038.750,00	332.038.750,00	230.000.000,00							230.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah perda dan perbup tata ruang				-	2 Perda	0,00	227.322.334,00	227.322.334,00	227.322.334,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi 7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota																		
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				-	1 Dokumen	0,00	227.322.334,00	227.322.334,00	227.322.334,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi 7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang				-	600 Kegiatan	0,00	49.597.576,00	49.597.576,00	49.597.576,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi 7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang				-	5 Kegiatan	0,00	55.118.840,00	55.118.840,00	55.118.840,00			-	7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi 7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	-		105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang																		
		J U M L A H							134.389.553.912,00	138.066.958.846,00	138.066.958.846,00	3.677.404.934,00							185.107.445.342,00	